BAB IV
DAMPAK KONSEP MURBA DI INDONESIA

A. Berdirinya Persatuan Perjuangan

Pemikiran seorang tokoh dikatakan berhasil jika pemikiran tersebut memberikan pengaruh dan bahkan memberikan dampak nyata dalam kehidupan. Begitu pula dengan Tan Malaka, seorang tokoh revolusioner yang berpikir dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka mulai tampil dalam aksi perjuangan pada masa revolusi, dimana sebelumnya Tan Malaka menjalani perantauannya di luar negeri karena menjadi buronan polisi internasional. Semasa perantauan ini, Tan Malaka melahirkan tulisan-tulisan yang ditujukan kepada rakyat Indonesia. Tulisan yang perlu dibaca dan dipahami oleh setiap rakyat Indonesia untuk mengerti terhadap kondisi bangsanya dan tahu akan apa yang harus dilakukan demi mendapatkan kemerdekaan.

Hubungan antara Tan Malaka dengan Syahrir mengalami pertentangan diawali ketika Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada kabinet Syahrir. Pertempuran di Surabaya mengakibatkan banyak korban dari rakyat Indonesia, melihat korban sebagai dampak pertempuran maka Syahrir merasa yakin dan perlu untuk melakukan perundingan terhadap Inggris dan Belanda. Rencana perundingan dimaksudkan untuk menghindarkan jatuhnya korban dari rakyat Indonesia yang akan berpengaruh pula terhadap situasi politik negara. Tan Malaka melihat dari sisi berbeda dengan Syahrir, pengorbanan perlu dilakukan sebagai bukti perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Proklamasi menjadi titik kembalinya Tan Malaka ke panggung politik, dimana ia dan pengaruhnya membawa seluruh rakyat masuk dalam sebuah

perlawanan terhadap bangsa asing yang masih bercokol di Indonesia. Melihat kemerdekaan Indonesia yang diganggu oleh bangsa asing, Tan Malaka merasa perlu untuk mempersatukan semua partai, ketentaraan dan badan-badan perjuangan, meskipun belum banyak mengenal kalangan atas yang memimpin.[1] Satu wadah untuk menyatukan segala unsur perjuangan dalam satu federasi yang dapat bergerak bebas dan cepat, sesuai dengan kehendak rakyat yang revolusioner. Pengadaan kongres merupakan langkah awal untuk mengumpulkan organisasi-organisasi yang bersimpati pada perjuangan yang sesuai dengan pemikiran Tan Malaka untuk membentuk sebuah federasi.[2]

Rencana pembentukan organisasi sebagian besar lahir dari pemikiran Tan malaka yang ditulisnya dalam brosur berjudul Muslihat yang menguraikan tentang organisasi, program dan susunan organisasi. Brosur ini ditulis dalam bentuk dialog antara wakil-wakil simbolis dari semua golongan yang diharapkan Tan Malaka untuk disatukan ke dalam gerakan perlawanan rakyat.[3] Dalam tulisan ini, Godam lebih banyak berperan dalam menjelaskan susunannya organisasi yang mana masalah pembentukan Volksfront harus lah dibagi menjadi tiga seksi. Seksi pertama dan yang tertinggi statusnya adalah seksi politik, yang bertanggung jawab

---

[1] Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara Jilid 3.* Jakarta: Teplok Press, 2000, hlm. 185.

[2] Harry A. Poeze, *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indoesia Jilid I: Agustus 1945-Maret 1946*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 184.

[3] Mr. Apal (para cendekiawan kota berpendidikan Barat), Denmas (bangsawan tradisional yang berpikiran maju), Toke (para pengusaha dan saudagar patriotis), Pacul (kaum tani), dan Godam (kaum buruh). Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 315.

merencanakan muslihat perjuangan menyeluruh dan menentukan taktik sehari-hari, menangani masalah organisasi, dan mempersiapkan serta menyebarkan propaganda. Seksi kedua menangani laithan militer dan polisi, pembentukan kader-kader dalam hal organisasi maupun perjuangan. Seksi ketiga bertanggung jawab terhadap urusan ekonomi yang berkaitan dengan perlawanan,.

Kongres pertama yang diadakan di Purwokerto, dihadiri sebanyak 132 organisasi yang terdiri dari partai, badan perjuangan, dan organisasi massa lainnya. Kongres yang diadakan selama tiga hari mempunyai tujuan untuk membahas hasrat perjuangan rakyat seluruh Indonesia yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah federasi. Tan Malaka berbicara kembali di depan umum setelah dua puluh tiga tahun, Tan Malaka banyak berbicara mengenai perjuangan dalam masa revolusi yang sedang dialami bangsa Indonesia. Pada kongres ini materi pembicaraan yang diberikan, Tan Malaka mencoba memberikan pencerahan dengan analisis yang mendalam dan berdasar pengetahuan filosofi, sosiologi dan taktik yang diperolehnya dari pengalaman.[4]

Pidato yang disampaikan oleh Tan Malaka dapat membakar semangat revolusi peserta-peserta yang ikut dalam kongres ini. Isi dalam pidato yang disampaikan turut membahas tentang susunan Volksfront dan minimum programnya. Tan Malaka mengemukakan pendapatnya bahwa republik jangan sampai memecah front persatuan dalam menghadapi Belanda karena adanya perbedaan paham. Menurutnya jika permasalahan tentang perbedaan pandangan politik dimunculkan pada masa berjuang, hanya akan melemahkan perjuangan dan

[4] Harry A. Poeze, *op.cit.*, hlm. 210.

menurunkan semangat rakyat, seperti dalam perseteruan SI dan PKI awal tahun 1920-an.[5] Panglima Tinggi Sudirman yang ikut dalam kongres di Purwokerto menyampaikan penjelasan tentang kedudukan TKR yang akan berjuang mempertahankan kemerdekaan karena tentara timbul tenggelam bersama dengan negara, dan juga mendukung pidato Tan Malaka tentang isi dan susunan Volksfront. Sudirman angkat bicara untuk meyakinkan para peserta untuk ikut berjuang demi tercapainya kemerdekaan yang 100%, dan membentuk sebuah Volksfront sebagai sarananya.[6]

Kongres kedua yang diadakan di Solo, dihadiri lebih banyak peserta dan organisasi daripada kongres pertama di Purwokerto. Pada kongres yang kedua inilah dibentuk sebuah organisasi yang di dalamnya tergabung dari banyak organisasi dan organisasi tersebut diberi nama Persatuan Perjuangan.[7] Nama Persatuan Perjuangan ini diambil dari pidato Tan Malaka, Tan Malaka menyampaikan minimum program yang kemudian disetujui oleh para peserta kongres meskipun mengalami sedikit perubahan. Penyusunan minimum program ini berdasarkan hasrat perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Berita dalam surat kabar menuliskan minimum program sebagai

---

[5] Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 169.

[6] *Kedaulatan Rakjat*, "Hasrat Perdjoeangan Rakjat Indonesia", 6 Januari 1946.

[7] Tan Malaka, *op.cit.*, hlm. 187.

hasil dari kongres Persatuan Perjuangan yang yang berisi tujuh program, antara lain:[8]

1. Beroending atas pengakoean kemerdekaan 100%.
2. Pemerintah Rakjat (dalam arti kesesoeaian antara haloean pemerintah dan rakjat).
3. Tentara Rakjat (dalam arti kesesoeaian antara haloean tentara dan rakjat).
4. Meloetjoeti sendjata Djepang.
5. Mengoeroes tawanan bangsa Eropah.
6. Mensita dan menjelenggarakan pertanian (perkeboenan).
7. Mensita dan menjelenggarakan perindoestrian (pabrik, bengkel, tambang, dll).

Panitia kongres pembentukan Persatuan Perjuangan mengundang para petinggi negara seperti presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri pada kabinet Syahrir, namun tidak ada yang hadir dengan alasan kesibukan. Kritikan dan cercaan yang yang ditujukan kepada pemerintah dan tentara membuat Sudirman menjadi kecewa dengan badan organisasi ini.[9] Sudirman dan ajudannya segera meninggalkan kongres sebelum mendengar pidato Tan Malaka karena kekecewaan akibat beberapa pidato di awal kongres, sekaligus simpatinya terhadap Persatuan Perjuangan menjadi hilang. Di sisi lain, Tan Malaka berhasil menarik simpati banyak organisasi melalui kongres ini, dan menyatukan berbagai organisasi yang berbeda ideologi dan garis politik dalam satu wadah. Pada rapat Persatuan Perjuangan pada akhir Januari, barisan Persatuan Perjuangan menjadi

---

[8] *Kedaulatan Rakjat*, "Persatoean Perdjoeangan Rakjat Lahir", 16 Januari 1946.

[9] Harry A. Poeze, *op.cit.*, hlm. 234.

semakin bertambah luas denga masuknya BKPRI, Barisan Banteng, dan Dewan Perjuangan Jawa Tengah, Timur, dan Barat.[10] Dalam waktu yang cukup singkat Persatuan Perjuangan mampu menjadi kekuatan oposisi bagi pemerintah pada saat itu.

Tan Malaka menekankan perlunya persatuan perjuangan dari semua orang dan semua aliran dan tingkatan untuk melaksanakan program umum yang berintikan tuntutan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pengusiran tentara asing dari Indonesia.[11] Pembentukan Persatuan Perjuangan diyakini dapat mempersatukan semua kekuatan politik dan ekonomi bangsa Indonesia untuk menghadapi kekuatan bangsa asing yang masih bercokol. Minimum program Persatuan Perjuangan yang disusun merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan bukanlah sebagai putusan yang selalu dibicarakan. Pelaksanaan minimum program Persatuan Perjuangan haruslah secara bersama-sama oleh seluruh komponen yang ada di Indonesia.

Awal terbentuknya Persatuan Perjuangan, banyak kritikan yang ditujukan kepada pemerintah tentang kinerja pemerintah yang masih saja menggunakan cara diplomasi dalam menghadapi penjajah. Persatuan Perjuangan merupakan sebuah penyatuan dari berbagai macam organisasi besar dan organisasi kecil, namun masih ada sebuah organisasi terbesar yang belum bergabung di dalamnya yaitu

---

[10] Ben Anderson, *op.cit.,* hlm. 325.

[11] G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 I: dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius,1991, hlm. 149.

pemerintah.[12] Keinginan dari Persatuan Perjuangan adalah masuknya pemerintah ke dalam organisasi ini, dengan maksud pemerintahlah yang memimpin organisasi Persatuan perjuangan. Minimum program yang terdiri dari tujuh pasal yang dibuat Persatuan Perjuangan pada dasarnya merupakan program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah,[13] rakyat dan badan organisasi lainnya berkewajiban membantu merealisasikan.

Hubungan antara pemerintah dan Persatuan Perjuangan tidak sebaik yang diharapkan, Persatuan Perjuangan lebih sering menjadi pihak oposisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan programnya. Pada prinsipnya perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan Persatuan Perjuangan adalah sama, namun visi dan taktik perjuangannya yang berbeda. Pertemuan antara Persatuan Perjuangan dan pemerintah membahas tentang kondisi yang dialami bangsa Indonesia sejak tibanya Inggris.[14] Persatuan Perjuangan dalam pertemuan ini lebih menekankan perlunya kerja sama dengan pemerintah dan rakyat untuk mengusir Inggris dari Indonesia melalui jalan revolusi. Jatuh bangunnya negara bukan terletak pada kekuatan beberapa orang yang cakap dalam pemerintahan, melainkan terletak pada kekuatan rakyat dan aparatur pemerintahan yang bersatu.

---

[12] *Kedaulatan Rakjat*, “Persatoean Perdjoeangan dan Pemerintah”, 23 Januari 1946.

[13] G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 151.

[14] *Kedaulatan Rakjat*, “Sekitar Pertemoean Delegasi Persatoean Perdjoeangan dan Pemerintah”, 11 Februari 1946.

Persatuan Perjuangan mengalami kemunduran karena anggota-anggota yang keluar akibat dari dibentuknya kabinet Syahrir II yang kemudian lebih mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Banyak dari organisasi yang keluar dari Persatuan Perjuangan berpendapat bahwa kelima program dari kabinet yang baru cukup progresif dan tidak berbeda secara prinsip.[15] Melihat aksi Persatuan Perjuangan yang tidak pula menurunkan tempo protesnya terhadap pemerintah, maka pemerintah melakukan penangkapan terhadap Tan Malaka dan beberapa anggota Persatuan Perjuangan dengan alasan melakukan oposisi dengan cara sembrono.[16] Tokoh-tokoh dari Persatuan Perjuangan yang ditangkap antara lain Tan Malaka, Moh. Yamin, Sukarni, Abikoesno Tjokrosoejoso, Sayuti Melik, dan Chairul Saleh.[17]

B. Peristiwa Revolusi Sosial di Surakarta

Revolusi yang terjadi di Indonesia merupakan masa pergolakan yang ditandai dengan srobotan, gedoran, dan pendaulatan, di samping masa perjuangan.[18] Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang pada kondisi krisis politik yang penuh dengan konflik antara golongan yang siap menggunakan cara radikal. Revolusi sosial adalah gerakan rakyat kalangan bawah untuk menggulingkan pejabat atau penguasa setempat yang terjadi sebagai rentetan dari

---

[15] G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 160.

[16] *Ibid*, hlm.49-50.

[17] Harry A. Poeze, *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indoesia Jilid II: Maret 1946-Maret 1947*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2009, hlm. 1.

[18] Sartono Kartodirdjo, Wajah Revolusi Indonesia Dipandang Dari Perspektivisme Struktural, *Prisma No. 8, Agustus 1981 Tahun X,* hlm. 3.

revolusi Indonesia.[19] Gerakan yang berpaham revolusioner menawarkan nilai-nilai baru dalam orde sosial yang masih menganut politik lama, oleh karena itu terjadinya pertentangan antara organisasi revolusioner dan unsur-unsur pemerintahan lama tidak dapat dihindarkan.[20] Berdirinya organisasi dengan paham revolusioner berusaha untuk menghancurkan peninggalan sistem kolonial dan mengganti sistem kekuasaan tradisional yang feodal.

Kolonialisme Belanda mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemerintahahan di keraton Surakarta, dimana pada tahun 1847 Belanda mengadakan reorganisasi struktur pemerintahan daerah Surakarta.[21] Reorganisasi yang dilakukan sebenarnya hanya suatu intensifikasi fungsional yang digunakan sebagai lembaga administrasi yang membantu pemerintah kolonial Belanda. Struktur pemerintahan hampir sama, hanya dimasukkan residen yang mendampingi patih sebagai kepala pemerintahan, dan asisten residen mendampingi bupati. Prakteknya patih dan bupati hanya menjadi simbol kekuasaan terhadap rakyatnya yang masih bersifat feodalis, sedangkan kekuasaan yang sebenarnya dipegang oleh pemerintahan kolonial Belanda sendiri. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi momentum lepasnya hegemoni Belanda

---

[19] Anthony Reid, Revolusi Sosial: Revolusi Nasional, *Prisma No. 8, Agustus 1981 Tahun X,* hlm. 35.

[20] Sartono Kartodirdjo, *op.cit.,* hlm. 6.

[21] Suyatno, “Birokrasi Tradisional dan Revolusi Sosial”. Dalam Lance Castles, Suyatno, dan Nurhadiantomo. *Birokrasi, Kepemimpinan, dan Revolusi Sosial.* Surakarta: Penerbit Hapsara, 1983, hlm.57.

terhadap keraton Surakarta, akan tetapi sisa-sisa pengaruh yang telah ditanamkan sulit dihilangkan.

Penetapan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) merupakan balas jasa atas pengakuan keraton Surakarta sebagai bagian dari RI. Persaingan antara penguasa Mangkunegaran dan penguasa Kasunanan menyebabkan Surakarta menjadi pusat pertentangan antara kaum feodal dan partai-partai.[22] Daerah yang baru saja menyandang starus istimewa ini menjadi pusat persaingan antara golongan kiri dengan golongan kanan, dan antara pemerintah dengan oposisi. Surakarta sebagai daerah istimewa mendapat pertentangan dari golongan kiri, PNI, dan Barisan Banteng yang merasa dikhianati oleh kaum feodal. Perbedaan pandangan politik dan ideologi menyebabkan keadaan yang saling bertentangan, saling mencurigai dan saling menuduh.

Konflik ditandai dengan perebutan kekuasaan antara kekuatan oposisi dengan kekuatan pemerintah atau kompetisi kelompok-kelompok yang sedang beroposisi.[23] Aksi-aksi kekerasan, penangkapan, dan penahanan menjadi bagian dari revolusi sosial di Surakarta. Keberadaan Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan telah menjadikan revolusi sosial berupa gerakan-gerakan anti swapraja

---

[22] A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 3.* Bandung: Penerbit Angkasa, hlm. 110.

[23] Manuel Kaisiepo, Murba di Tengah Persaingan: Tan Malaka dalam Revolusi Kemerdekaan 1945-1949, *Prisma No. 9, September 1982 Tahun XI*, hlm. 80.

di Surakarta sebagai bagian dari strategi untuk menggoyangkan kabinet Syahrir.[24] Barisan Banteng menjadi sebuah kelompok oposisi yang berpengaruh di Surakarta, yang merupakan anggota dari Persatuan Perjuangan, yang di pimpin oleh dr. Moewardi dan Soediro sebagai wakilnya.[25] Pada Januari 1946, Barisan Banteng melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Susuhunan, Kanjeng Ratu, dan Soerjohamidjojo tanpa adanya hubungan dengan dunia luar untuk menyadarkan bahwa rakyat tidak senang dengan keistimewaan status yang diperolehnya.[26] Pada 30 April 1946, Susuhunan PB XII memberikan maklumat mengenai lenyapnya Daerah Istimewa Surakarta berdasarkan kehendak rakyat dan penyerahan kekuasaan kepada pemerintah pusat.[27] Maklumat lenyapnya Daerah Istimewa Surakarta oleh Susuhunan PB XII disambut oleh baik oleh dr. Moewardi selaku pemimpin umum Barisan Banteng. Sambutan yang disampaikan oleh Dr. Moewardi menyatakan bahwa;

> "....karena dasar perdjoeangan dari Barisan Banteng ialah oentoek memegang tegoeh asas2 dan dasar bentoek Negara Indonesia sebagai Republik Kesatoean, maka perobahan daerah2 jang sekarang masih Istimewa mendjadi daerah jang mendjoendjoeng tinggi poela sifat Repoeblik mengenangkan hati kami...."[28]

---

[24] Julianto Ibrahim, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta.* Wonogiri: Bina Citra Pustaka, 2004, hlm. 156.

[25] Soebagijo I. N., *Sudiro Pejuang Tanpa Henti*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1981, hlm. 164.

[26] Ben Anderson, *op.cit.*, hlm, 389.

[27] *Kedaulatan Rakjat*, "Sekitar Daerah Istimewa Soerakarta", 4 Mei 1946.

[28] *Ibid.*

Berbeda dengan Susuhunan yang segera melepaskan keistimewaannya, Mangkunegoro lebih sulit karena memberikan suatu pernyataan yang dengan jelas menggambarkan tekadnya untuk meneruskan otonominya dan status politik yang disamakan dengan Sultan di Yogyakarta.[29] Banyak tokoh masyarakat yang tidak menyukai kepemimpinan dan status istimewa yang dimiliki oleh Sunan dan Mangkunegoro, karena dinilai tidak dapat menyesuaikan diri dengan gejolak zaman. Keistimewaan yang diperoleh keraton Surakarta dipandang sebagai keegoisan yang tidak mau tunduk terhadap pemerintah dan memupuk kembali feodalisme, sehingga keistimewaan Surakarta dianggap perlu dihilangkan.

Melihat pergolakan yang terjadi, maka markas Barisan Banteng Surakarta mengeluarkan pernyataan dalam maklumat tanggal 18 Mei 1946 yang berbunyi;[30]

Maklumat Markas Daerah Barisan Banteng Surakarta

Kita bangsa Indonesia yang merdeka hanya mengakui satu pemerintahan, ialah pemerintahan Republik Indonesia, yang dipimpin oleh P.Y.M. Presiden Ir. Sukarno dan P.Y.M. Drs. Moh. Hatta. Barang siapa yang tisak setia kepada pemerintah Republik, boleh ditentukan bahwa ia adalah:

1. Pengkhianat bangsa dan negara;
2. Mata-mata musuh;
3. Perusak keamanan dan ketentraman.

---

[29] Ben Anderson, *op.cit.,* hlm. 393.

[30] A. H. Nasution, *op.cit.,* hlm. 111.

Oleh karena itu barang siapa yang mengetahui orang-orang itu tidak peduli besar atau kecil yang bertindak demikian supaya melaporkan kepada yang berwajib ialah:

1. Polisi Republik.
2. Polisi Tentara.
3. Badan-badan dan badan-badan perjuangan yang ada di situ yang selanjutnya akan meneruskan kepada yang berwajib.

Pengkhianat bangsa dan negara atau mata-mata musuh harus diberantas dan dihukum seberat-beratnya.

Markas Daerah Barisan Banteng

Surakarta

Barisan Banteng merupakan organisasi kelaskaran yang nasionalis radikal, oleh karena itu perjuangan fisik lebih didukung daripada suatu diplomasi yang akhirnya membuat rakyat semakin terpuruk. Sebagai organisasi yang nasionalis namun melalui jalan radikal, Barisan Banteng tidak menyetujui adanya suatu daerah yang diberi keistimewaan untuk mempunyai pemerintahah sendiri. Sikap anti swaparaja dilakukan oleh anggota Barisan Banteng yang ekstrim dengan menahan beberapa kaum bangsawan keraton dengan tuduhan sebagai mata-mata NICA/Belanda. Penculikan ini dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap para bangsawan dan dengan segera mau meleburkan diri dengan pemerintah.

Beberapa bangsawan yang menjadi korban penculikan antara lain; Kanjeng Ratu Pakubuwono, Ibunda Sri Paduka Kanjeng PB XII, Patih Kanjeng Raden Adipati Judonagoro, dan beberapa pembesar keraton lainnya, serta Soekardjo

Wirjopranoto yang pada zaman kolonial pernah menjadi anggota Volksraad.[31] Para bangsawan ini ditahan di Kandang Menjangan daerah Kartasura, dengan dijaga oleh Barisan Banteng dan Polisi Tentara Surakarta. Para bangsawan dan pembesar yang berada di keraton Mangkunegaran tidak berhasil diculik karena keraton dijaga ketat oleh prajurit dan bekas prajurit Mangkunegaran.[32] Masyarakat menghendaki adanya pemerintahan tunggal tidak seperti DIS yang memiliki dualitas pemerintahan. Seiring dengan aksi penculikan, para anti swapraja terus melancarkan tuntutannya tentang pembubaran swapraja atau keistimewaan Surakarta.

Rapat umum menuntut penghapusan Daerah Istimewa Surakarta diadakan badan perjuangan dan organisasi di Klaten, Sragen, dan Boyolali. Para guru di Tawangmangu dan Wonogiri memutuskan hubungan dengan pemerintahan Mangkunegaran, serta mendesak supaya Surakarta mensejajarkan dengan karesidenan-karesidenan yang lain dalam melaksanakan pemilihan umum secara demokrasi.[33] Keadaan di Surakarta semakin mengalami pergolakan akibat dari revolusi sosial yang sedang berlangsung. Untuk mengendalikan kondisi dan keamanan di Surakarta, maka pada 1 Juni 1946 dibentuk sebuah Pemerintahan Daerah Rakyat dan Tentara (PDRT). Pembentukan PDRT menandakan dualitas

---

[31] *Ibid*, hlm. 172.

[32] Soewidji, *Kisah Nyata di Pinggir Jalan Slamet Riyadi di Surakarta*. Semarang: Percetakan Universitas Satya Wacana, t.t, hlm. 62.

[33] Ben Anderson, *op.cit.*, hlm. 396.

pemerintahan di Surakarta telah berakhir dan gerakan anti swapraja berhasil menghilangkan keistimewaan yang dimiliki oleh dua penguasa Surakarta.

Pergolakan sebagai proses dari revolusi sosial di dua daerah yang memiliki keraton masih terasa. Surakarta dan Yogyakarta menjadi basis dua golongan yang bertentangan, antara golongan oposisi di Surakarta dan golongan pendukung pemerintah di Yogyakarta. Penculikan Syahrir juga merupakan bagian dari aksi dari golongan oposisi untuk mendapat persetujuan atas tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Menganggapi hal itu, pemerintah bertindak untuk segera menyelesaikan pertentangan dengan golongan oposisi di Surakarta dengan menghapuskan keistimewaan Surakarta. Pemerintahan swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran dihapuskan sehingga dua swapraja tersebut disatukan menjadi satu karesidenan Surakarta.[34] Kemudian pada 15 juli 1946 berdasarkan peraturan presiden menetapkan bahwa Surakarta menjadi karesidenan dengan Iskak Tjokrodisurjo sebagai residen dan Sudiro sebagai wakil residen.[35]

C. Berdirinya Partai Murba

Pertengahan September 1948 Tan Malaka dan Sukarni dibebaskan dari penjara karena tidak diperoleh bukti-bukti yang cukup. Keluarnya Tan Malaka dari penjara disambut baik oleh rekan-rekan dan pengikut-pengikutnya, akan tetapi bagi Tan Malaka sendiri melihat Persatuan Perjuangan yang semakin terpuruk membuatnya terpukul.[36] Tan malaka memandang bangsa Indonesia

---

[34] Soewidji, *op.cit.*, hlm. 63.

[35] Soeyatno, Feodalisme dan Revolusi di Surakarta 1945-1950, *Prisma No. 7, Agustus 1978 Tahun VII*, hlm. 54.

sebagai bangsa yang membingungkan, karena sangat cepat berubahnya pendirian orang-orangnya. Perasaan terpukul tidaklah terjadi berlarut-larut, pemikirannya yang revolusioner dan sikap optimisnya membuatnya sekali lagi menjadi promotor. Tan Malaka mempunyai gagasan bahwa kekuatan yang masih mendukung tujuan Persatuan Perjuangan harus dipersatukan kembali dalam satu wadah yang lebih solid.[37]

Tan Malaka memandang perlunya dibentuk sebuah partai revolusioner yang dapat mengumpulkan dan memusatkan kekuatan revolusioner Indonesia dengan jalan aksi massa teratur untuk meretas kemerdekaan nasional.[38] Tan Malaka memandang partai-partai yang ada di Indonesia bukanlah suatu partai tetapi lebih kepada perhimpunan-perhimpunan yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang berlainan pandangan dan tindakan politiknya. Keinginannya adalah membentuk sebuah partai yang disiplin, di dalamnya bergabung orang-orang yang satu pandangan dan tindakan politik, serta mau berkorban demi kepentingan partai dan negaranya. Disiplin merupakan nyawa dari sebuah pergerakan revolusioner yang harus dimiliki suatu partai.[39]

Partai yang dimaksud adalah partai yang sarat dengan suatu aksi atau tindakan, aksi yang tetap dan teratur yang berdasarkan pada program dan tujuan partai. Partai yang menghendaki aksi dari setiap anggotanya melalui pembuktian

---

[36] Hadidjojo, *Ayahku Maroeto Nitimihardjo: Mengungkap Rahasia Gerakan Kemerdekaan.* Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2009, hlm. 231.

[37] *Ibid*.

[38] Tan Malaka, *Aksi Massa.* Jakarta: Teplok Press, 2000, hlm. 102.

[39] Tan Malaka, *Semangat Muda.* t.p., t.t., hlm. 68.

dengan tindakannya bahwa ia melaksanakan keputusan secara benar dan setia terhadap partai. Untuk menjaga keutuhan partai, haruslah ada keterbukaan sehingga tiap-tiap anggota partai diberi kebebasan bersuara, mengemukakan dan mempertahankan pendapat.[40] Partai haruslah memiliki peraturan besi selanjutnya barulah mampu memusatkan tindakan partai, maksudnya aturan yang secara mutlak harus dipatuhi dan jika terjadi pelanggaran harus anggota tersebut keluar dari partai karena akan menjadi contoh buruk bagi anggota yang lain.

Nama partai yang dipilih adalah Partai Murba mempunyai arti rakyat kecil yang berasal dari bahasa sansekerta atau proletar dalam pengertian politik.[41] Partai Murba adalah sebuah partai bagi rakyat, sehingga bersifat kerakyatan dan demokrasi. Sebelum berdirinya Partai Murba, telah tersiar berita bahwa akan berdiri sebuah partai yang menggabungkan tiga aliran besar dalam masyarakat yaitu nasionalisme, islamisme, dan sosialisme.[42] Fanatisme terhadap salah satu golongan atau aliran dengan merasa yang paling cakap memimpin tonggak revolusi tidak akan berhasil. Tan Malaka menegaskan bahwa perlunya kesatuan antara ketiga aliran tersebut untuk menjadikan revolusi di Indonesia berhasil, bukan tempatnya untuk salah satu aliran tadi merasa paling berhak dan mampu memimpin revolusi.

---

[40] Tan Malaka, *op.cit.*, hlm. 103.

[41] Hadidjojo, *op.cit.*

[42] *Kedaulatan Rakjat*,"Partai Murba", 5 November 1948, dijelaskan lagi dasar perjuangan Partai Murba ialah kebangsaan, keagamaan, dan kemurbaan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi salah paham bahwa hanya islam yang masuk di dalamnya melainkan semua agama yang ada di Indonesia, *lihat Nasional*, "Tritunggal Partai Murba", 11 November 1948.

Tan Malaka yang bertindak sebagai promotor pendirian partai mendasarkan perjuangan pada aksi Murba dengan tujuan mempertahankan dan memperkokoh kemerdekaan Indonesia.[43] Partai Murba pada 7 November 1948, setelah satu bulan lebih terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948.[44] Tidak hanya Tan Malaka yang berpengaruh dalam pendirian Partai Murba, ada pula tokoh-tokoh lain; Iwa Kusumasumantri, Achmad Soebardjo, Roestam Effendi, dan Moh. Yamin.[45] Partai Murba merupakan fusi dari beberapa partai yang tergabung dalam GRR antara lain; Partai Rakjat, Partai Rakjat Djelata, dan Partai Buruh Merdeka, yang menyatukan tujuan menentang kapitalisme dan imperialisme.[46] Susunan dari Partai Murba terdiri atas;[47]

1. Ketua Umum : Sukarni
2. Ketua II : Maruto Nitimiharjo
3. Ketua III : Sutan Dawanis
4. Sekretaris Jendral : Sjamsu Harja Udaya
5. Sekretaris Umum : Pandu Karta Wiguna
6. dan dewan partai terdiri dari 25 orang.

---

[43] Hary Prabowo, *Perspektif Marxisme Tan Malaka: Teori dan Praksis Menuju Republik*. Yogyakarta: Jendela, 2002, hlm. 272.

[44] Emalia I. Sukarni, *Sukarni dan Actie Rengasdengklok*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm. 153.

[45] Hadidjojo, *op.cit.*, hlm. 248.

[46] *Kedaulatan Rakjat*, “Rapat Umum Partai Murba”, 7 November 1948.

[47] *Nasional*, “Tritunggal Partai Murba”, 11 November 1948.

Partai Murba merupakan partai yang kecil akan tetapi menjadi sebuah partai yang berpengaruh dan peka terhadap gejolak sosial yang terjadi di Indonesia.[48] Partai Murba memposisikan sebagai partai kader, karena kader menjadi tulang punggung partai yang harus meneruskan tujuan partai dan aturan partai dengan bergerak bersama rakyat. Hal tersebut sesuai dengan gagasan awal dari Tan Malaka yang lebih memilih untuk melakukan kaderisasi terhadap orang-orang muda untuk memimpin partai. Partai Murba sulit berkembang karena dikenal sebagai partai yang keras dan selalu bersikap oposisi terhadap pemerintah.[49]

---

[48] Emalia I. Sukarni, *op.cit.*, hlm. 158.

[49] Hadidjojo, *op.cit.*, hlm. 361.